

# EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DI KECAMATAN TEMBALANG

Oleh :

Maulana Yusup Saputra, Dyah Lituhayu

**Departemen Administrasi Publik  
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  
Universitas Diponegoro**

Jalan Profesor Haji Soedharto, Sarjana Hukum Tembalang Semarang Kotak Pos 1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman : [http// www.fisip.undip.ac.id](http://www.fisip.undip.ac.id) email [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

## ABSTRACT

*Education is very important in the process of improving human resources. Because every citizen has the right to obtained a good education. Early childhood education is an effort of constructing, addressed to children from the early birth up to the age of six. Tembalang subdistrict is the area that has the most PAUD and education unit. The research was purposed to evaluate the implementation of the PAUD, Knowing teacher competences, knowing why the PAUD teacher has not academically qualified. The research method that was used is qualitative analysis with data capture techniques namely observation, interviews, and documentation. Informants in this study is the head unit for the education of Kecamatan Tembalang, headmaster, teachers and parents. The result showed obstacles in the implementation of the program, there are several agencies that still graduated from senior high school. Professional teachers should possess the minimum academic qualifications Bachelor's degree (S-1) or four diploma (D-IV), master the competencies (pedagogy, professional, social and personality). The condition of facilities and infrastructures are less supportive in maximizing the PAUD program. Unit for the education of Kecamatan Tembalang lack Human Resources especially for the position of overseer of PAUD. Recommendations for improving the PAUD's program in tembalang is the need for competence development training to educators education. Mapping the needs of institutions of PAUD objectively. Provide incentives and ease to the teacher to proceed to a higher level. The addition of human resources for the position of overseer.*

**Keywords: Evaluation, PAUD Education, Infrastructure, Competence**

## **PENDAHULUAN**

### **A.Latar Belakang Masalah**

Pendidikan menjadi hal yang sangat penting dalam proses peningkatan sumber daya manusia . Dengan disadarinya betapa pentingnya proses peningkatan sumberdaya manusia berhubungan langsung dengan peningkatan kualitas pendidikan, maka pemerintah pun terus melakukan usaha mewujudkan pendidikan berkualitas melalui berbagai pengembangan dan perbaikan mulai dari sistem pendidikan hingga sarana dan prasarana pendidikan . Seperti yang tertulis pada Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 31 ayat (1) telah mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki secara optimal.

Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dinyatakan di Pasal 13 ayat (1) Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal yang dapat saling melengkapi. Jenjang Pendidikan terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan

keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. Sedangkan Kegiatan pendidikan informal dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Pendidikan yang berjenjang ini dimaksudkan agar pendidikan dimaknai sebagai kebutuhan masyarakat yang bisa diterima setiap tingkatannya.

Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan nonformal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional. Salah satu jenis Pendidikan Non formal yakni PAUD, Pendidikan Anak Usia Dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

Berdasarkan Perda No 1 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan

Kota Semarang di pasal 27 dijelaskan bahwa Pendidikan Anak Usia Dini terdiri dari beberapa jenis satuan PAUD yang dibedakan melalui jalur formal, nonformal dan informal. Pendidikan Anak Usia Dini jalur formal meliputi Taman Kanak-kanak (TK), Atau bentuk lain yang sederajat. Pendidikan Anak Usia Dini jalur pendidikan nonformal meliputi Kelompok Bermain (KB) , Taman Penitipan Anak (TPA) , atau bentuk lain yang sederajat. Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan informal meliputi pendidikan keluarga, atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan.

Untuk mendukung terselenggaranya Sistem Pendidikan Nasional yang baik pemerintah juga memiliki regulasi yang mendukung yakni Permendiknas No 16 tahun 2007 tentang Standart Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru. Pendidik pada Pendidikan Anak Usia Dini harus memiliki kualifikasi akademis minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) di Bidang Pendidikan Anak Usia Dini atau Psikologi. Tenaga pendidik yang berkompeten sangat dibutuhkan untuk mengembangkan program PAUD ini. Dari data yang tertera pada tabel menunjukkan jumlah tenaga pendidik Pendidikan Anak Usia Dini masih banyak berpendidikan SLTA secara keseluruhan terutama di Kecamatan

Tembalang dan Kecamatan Banyumanik. Untuk di Kecamatan Temabalang presentase Guru lulusan SMA sebanyak 34,9% , lulusan Diploma sebanyak 19,6% dan lulusan sarjana sebanyak 45,5 % .

Selain kemampuan guru dalam menyelenggarakan kegiatan pengajaran, dukungan dari sarana dan prasarana pembelajaran sangat penting dalam membantu menyampaikan materi. Guru membutuhkan sarana pembelajaran dalam kegiatan belajar. Semakin lengkap dan memadai sarana pembelajaran yang dimiliki sekolah akan memudahkan guru dalam melaksanakan tugasnya sebagai tenaga pendidik. Sarana dan prasarana harus dikembangkan untuk menunjang proses pembelajaran. Dari data yang di dapatkan kondisi sarana dan prasarana penunjang program Pendidikan Anak Usia Dini masih ada beberapa yang mengalami kerusakan.dari jumlah total 286 sarana-prasarana yang mengalami kerusakan ringan hingga kerusakan parah berjumlah 162.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Program Pendidikan Anak Usia Dini di Kecamatan Tembalang dilaksanakan ?
2. Kompetensi apa saja yang harus di kuasai untuk menjadi Guru PAUD?

3. Apa yang menyebabkan guru PAUD belum memiliki kualifikasi akademis menurut Peraturan Menteri Pendidikan No. 16 Tahun 2007?

### C. Tujuan Penelitian

1. Melakukan Evaluasi Pelaksanaan Program Pendidikan Anak Usia Dini di Kecamatan Tembalang.
2. Mengetahui Kompetensi Guru Program Pendidikan Anak Usia Dini terhadap Pendidikan di Kecamatan Temabalang.
3. Mengetahui faktor penyebab guru PAUD belum memiliki Kualifikasi akademis menurut Peraturan Menteri Pendidikan No.16 Tahun 2007.

### D. Kerangka Pemikiran Teoritis

#### 1. Kebijakan Publik

Secara umum , istilah “kebijakan” atau “*policy*” digunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat , suatu kelompok , maupun suatu lembaga pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Kebijakan publik jika dilihat dari kamus administrasi publik Chandler dan Plano (Winarno, 2007 : 19) mengatakan bahwa “Kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber-sumber daya yang ada untuk memecahkan

masalah publik atau pemerintah”. Bahkan Chandler dan Plano beranggapan bahwa kebijakan publik merupakan suatu bentuk investasi yang kontinu oleh pemerintah demi kepentingan orang-orang yang tidak berdaya dalam masyarakat agar mereka dapat hidup dan ikut berpartisipasi dalam pemerintahan .

Thomas R. Dye (dalam Wirawan, 2011 : 90-91) , mengatakan bahwa kebijakan publik adalah “Apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan”. Dye mengatakan bahwa bila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu maka harus ada tujuannya (obyektifnya) dan kebijakan publik itu meliputi semua tindakan pemerintah , jadi bukan semata-mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah saja.

Berdasarkan pengertian kebijakan publik diatas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah suatu rangkaian pilihan-pilihan untuk menyelesaikan permasalahan publik yang dilakukan oleh pemerintah maupun tidak dilakukan oleh pemerintah.

#### 2. Evaluasi Kebijakan

Sebuah kebijakan publik tidak bisa dilepas begitu saja, tanpa dilakukan evaluasi. Evaluasi kebijakan dilakukan untuk menilai sejauhmana keefektifan

kebijakan publik untuk dipertanggung jawabkan kepada publiknya dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi dibutuhkan untuk melihat kesenjangan antara harapan dan kenyataan.

Menurut Indiahono (2009:125) Evaluasi Kebijakan Publik adalah menilai keberhasilan/kegagalan kebijakan berdasarkan indikator-indikator yang telah ditentukan. Indikator-indikator untuk mengevaluasi kebijakan biasanya menunjuk pada dua aspek yaitu aspek proses dan hasil.

Menurut Anderson (Winarno,2007:226), “Evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak”. Dalam hal ini, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap perumusan masalah-masalah kebijakan, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap dalam kebijakan.

## 2.1 Model Evaluasi CIPP ( Context, Input, Process, Product)

Stufflebearn dalam Wirawan (2011 :92-94) menyatakan Model Evaluasi CIPP merupakan kerangka yang komprehensif untuk mengarahkan pelaksanaan evaluasi formatif dan evaluasi sumatif terhadap obyek program, proyek personalia, produk , institusi , dan sistem. Model CIPP terdiri dari empat jenis evaluasi, yaitu Evaluasi Konteks (*Context Evaluation*), Evaluasi Masukan (*Input Evaluation*), Evaluasi Proses (*Prosess Evaluation*), dan Evaluasi Produk (*Product Evaluation*).

1. **Evaluasi Konteks**, menurut Daniel Stufflebearn evaluasi konteks untuk menjawab pertanyaan apa yang perlu dilakukan? Evaluasi ini mengidentifikasi dan menilai kebutuhan-kebutuhan yang mendasari disusunnya suatu program.
2. **Evaluasi Masukan**, evaluasi masukan untuk mencari jawaban atas pertanyaan: apa yang harus dilakukan? Evaluasi ini mengidentifikasi dari problem, aset, dan peluang untuk membantu kelompok-kelompok lebih luas pemakai untuk menilai tujuan, prioritas, dan manfaat-manfaat dari program, menilai pendekatan alternatif, rencana tindakan, rencana staf, dan anggaran untuk feasibilitas

dan potensi *cost effectiveness* untuk memenuhi kebutuhan dan tujuan yang di targetkan.

3. **Evaluasi Proses**, evaluasi proses berupaya untuk mencari jawaban atas pertanyaan: apakah program sedang dilaksanakan? Evaluasi ini berupaya untuk mengakses pelaksanaan dari rencana untuk membantu staf program melaksanakan aktifitas dan kemudian membantu kelompok pemakai yang lebih luas menilai program dan menginterpelasikan manfaat.
4. **Evaluasi produk**, evaluasi produk diarahkan untuk mencari jawaban pertanyaan: *did it succeed?* Evaluasi ini berupaya mengidentifikasi dan mengakses keluaran dan manfaat baik yang direncanakan maupun tidak direncanakan, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Keduanya untuk membantu staf menjaga upaya memfokuskan pada mencapai manfaat yang penting dan akhirnya untuk membantu kelompok-kelompok pemakai lebih luas mengukur kesuksesan upaya dalam mencapai kebutuhan-kebutuhan yang di targetkan.

## **E. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, dimana peneliti lebih menekankan pada

suatu analisis dan sekaligus penggambaran tentang kondisi realitas yang ada, sehingga hasil penelitian tersebut adalah banyak menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau tidak tertulis dari pelaku yang diamati. Penelitian ini berlokasi di Kecamatan Tembalang, Semarang. Teknik pemilihan informan yang dipergunakan penulis dalam penelitian ini adalah purposive. Adapun teknik pengumpulan data adalah dengan melakukan pengamatan, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan Teknik untuk menguji keabsahan data penulis melakukan reduksi data, penyajian data dan Penarikan Kesimpulan. Untuk melakukan analisis kredibilitas, penulis menggunakan triangulasi.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini di Kecamatan Tembalang**

Dasar pelaksanaan Program pendidikan anak usia dini di Kecamatan Tembalang yaitu sejak adanya Perda terbaru mengenai Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Semarang No 1 Tahun 2007 yang terdapat di pasal 27 yang membahas mengenai PAUD. Dalam pelaksanaan Program PAUD di Kecamatan Tembalang menjadi tanggung jawab UPTD Pendidikan Kecamatan Tembalang. Berdasarkan hasil penelitian penulis Pendidikan anak usia dini formal di Kecamatan Tembalang

sebenarnya sudah berjalan cukup lama yakni sejak tahun 1974. Sedangkan PAUD non formal dan informal mulai muncul sejak 2010.

Guru sebagai pendidik program pendidikan anak usia dini memiliki forum perkumpulan dan forum diskusi bersama *stake holder*. Perkumpulan tersebut meliputi gugus, dabin, dan GOP (Gabungan Organisasi Penyelenggara), di kecamatan Tembalang terdapat 20 gugus, 4 dabin.

## **2. Manfaat Program Pendidikan Anak Usia Dini**

Program pendidikan anak usia dini merupakan salah satu jenis pendidikan yang berfokus pada pembinaan anak hingga usia enam tahun. Menurut pendapat narasumber selaku guru PAUD, Pendidikan Anak Usia Dini sangat bermanfaat bagi anak-anak yang masih belia untuk pembentukan kepribadian dan menanamkan nilai-nilai baik untuk persiapan menuju jenjang sekolah yang lebih tinggi. Selain hal tersebut, PAUD juga berguna untuk merespon tahapan perkembangan anak karena PAUD menjadi keutuhan dasar yang di harapkan dapat memfasilitasi dan mendukung perkembangan anak secara baik secara fisik, psikis maupun sosial.

## **3. Hambatan Pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini di Kecamatan Tembalang**

Menurut hasil penelitian di Kecamatan Tembalang mengalami hambatan dari dalam lembaga pendidikan itu sendiri. Terdapat beberapa lembaga yang tenaga pendidiknya masih lulusan SLTA sehingga menyebabkan guru perlu di tuntut aktif untuk memperdalam pendidikannya. Kondisi sarana dan prasarana juga menjadi hambatan dalam memaksimalkan program pendidikan anak usia dini. Salah satu permasalahannya yang terdapat di TK Mardi Utomo kekurangan fasilitas pendukung untuk memaksimalkan pembelajaran, seperti daya tampung kelas yang tidak sesuai semestinya dikarenakan banyaknya siswa di lembaga tersebut. Alat praktik untuk anak-anak belajar menggunakan bahan perantara masih menggunakan peralatan yang kondisinya kurang memadai. Selain hambatan dari internal lembaga pendidikan PAUD dari UPTD Pendidikan Kecamatan Tembalang kekurangan SDM Khususnya SDM yang bertugas sebagai tenaga penilik.PAUD.

## **4. Kompetensi Guru dalam Pelaksanaan Program Pendidikan Anak Usia Dini**

Guru menjadi aktor terdepan dalam proses kegiatan belajar mengajar yang bersentuhan langsung dengan siswa. Posisi dan peran strategis guru membutuhkan kompetensi khusus yang mumpuni sehingga diharapkan guru benar-benar

mampu menunjukkan kemampuan yang maksimal dalam proses pembelajaran. Kompetensi yang harus dimiliki oleh guru yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, kompetensi keperibadian dan kompetensi profesional.

## **5. Pengembangan Kompetensi Guru**

Pengembangan guru menjadi kegiatan untuk meningkatkan kualitas pendidik menjadi sangat penting, terlebih lagi dengan adanya kebijakan peraturan perundangan baru yang mensyaratkan guru dan dosen untuk mendapatkan sertifikasi profesi.

Pelatihan bagi tenaga pendidik sebagai salah satu bentuk untuk pengembangan kompetensi, di Kecamatan Tembalang pelatihan untuk guru PAUD berdasarkan informasi yang di dapat penulis pelatihan tersebut belum pernah dilakukan oleh UPTD Pendidikan Kecamatan Tembalang. Hal itu dikarenakan untuk pelatihan menjadi kewenangan lembaga pendidikan masing-masing.

## **6. Faktor Penyebab Belum Terpenuhinya Kualifikasi Akademik Guru**

Sebagian besar lembaga PAUD yang berada di Kecamatan Tembalang merupakan lembaga swasta yang menyebabkan dari pemerintah tidak bisa

bertindak lebih banyak hanya bisa sebatas memberi himbuan untuk guru bersekolah lagi agar sesuai dengan standar yang telah ditentukan.

Faktor-faktor banyak guru tidak menekuni profesi secara utuh menjadi tanda bawasannya komitmen dan motivasi guru untuk meraih pendidikan yang lebih tinggi masih rendah. Selain itu masalah gaji yang kecil juga menjadi permasalahan, karena beberapa PAUD berazaskan dengan kesukarelaan dan sikap kepedulian dari guru yang mengajar.

## **7. Evaluasi Pelaksanaan Program Pendidikan Anak Usia Dini Menggunakan Model CIPP**

### **7.1 Evaluasi Konteks**

Jumlah lembaga PAUD formal yang berada di Kecamatan Tembalang berjumlah 144 lembaga, dari jumlah total tersebut terdapat satu TK negeri yang berada di Kecamatan Tembalang. Tujuan diadakannya PAUD yang ingin dicapai dari keterangan narasumber adalah untuk pengembangan pengetahuan anak, menambah pemahaman orang tua dan guru serta pihak-pihak yang terkait betapa pentingnya pendidikan dan perkembangan anak. Selain itu, Untuk membantu menyiapkan anak mencapai kesiapan belajar (akademik) di sekolah, Intervensi dini dengan memberikan rangsangan sehingga dapat menumbuhkan potensi-potensi yang tersembunyi (*hidden potency*)



yaitu dimensi perkembangan anak (Bahasa, intelektual, emosi, sosial, *motoric*, konsep diri, minat dan bakat), Melakukan deteksi dini terhadap kemungkinan terjadinya gangguan dalam pertumbuhan dan perkembangan potensi-potensi yang dimiliki anak.

## 7.2 Evaluasi Masukan

Tenaga pendidik menjadi unsur yang sangat penting bagi pendidikan anak usia dini. Pendidik anak usia dini adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, dan menilai pembelajaran, serta melakukan pembimbingan, pengasuhan dan perlindungan anak didik. Komposisi pendidik PAUD pada jalur pendidikan formal terdiri atas guru dan guru pendamping. Persyaratan yang mengharuskan guru mempunyai kualifikasi pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) dalam bidang pendidikan anak usia dini yang diperoleh dari program studi terakreditasi, atau memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) kependidikan lain yang relevan atau psikologi. Jumlah tenaga pendidik PAUD yang ada di Kecamatan tembalang yang memenuhi strandart lulusan S1 hanya berjumlah 45,5% dari target keberhasilan sejumlah 80%.

Kondisi ruangan Daya tampung Lembaga penyelenggara PAUD masih terbatas begitu pula dengan kondisi sarana prasarana pendukung, saat ini masih ada alat peraga permainan yang merupakan permainan lama dan dalam kondisi yang rusak.

## 7.3 Evaluasi Proses

Forum/paguyuban menjadi tempat untuk UPTD Pendidikan Kecamatan Tembalang melakukan komunikasi secara mendalam terhadap tiap lembaga PAUD yang berada di Tembalang. Dari forum tersebut terlihat bawasannya dana bantuan operasional tidak untuk semua PAUD dan melalui forum ini bisa terlihat lembaga mana saja yang memenuhi syarat dan yang membutuhkan.

Ada beberapa lembaga PAUD yang berada di Kecamatan Tembalang masih belum mempunyai ijin operasional untuk mendirikan PAUD, dalam kasus ini UPTD Pendidikan selalu memberikan pendampingan agar segera mendapat ijin opsional. Selain permasalahan itu, di internal UPTD juga memiliki permasalahan yaitu tidak adanya penilik yang bertugas untuk mengawasi serta melakukan evaluasi atas program PAUD.

## 7.4 Evaluasi Produk

Kebijakan yang di ambil dari UPTD Pendidikan dalam menyelesaikan permasalahan program PAUD lebih cenderung melakukan komunikasi yang intens terhadap lembaga PAUD melalui forum komunikasi yang ada di lingkup lembaga PAUD.

Tingkat pencapaian tujuan program paud sekitar 70%-80%. Tetapi masih ada yan perlu diperbaiki yakni tingkat pendidikan guru PAUD yang sesuai dengan standart kualifikasi, keberadaan penilik yang perlu di tindaklanjuti serta pembagian bantuan biaya operasioal PAUD yang merata.

## F. KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penyajian data dan pembahasan dalam penelitian mengenai Evaluasi Pelaksanaan Program Pendidikan Anak Usia Dini di Kecamatan Tembalang dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pendidkan Anak Usia Dini merupakan program pendidikan bagi anak untuk membantu meletakkan dasar bagi perkembanagn fisik dan mental anak usia 0-6 tahun. Terdapat satu lembaga PAUD formal yang berstatus negeri yang berada di Kecamatn

Tembalang, dan 143 sisanya merupakan lembaga PAUD swasta. UPTD Pendidikan melakukan pembinaan melalui Forum/paguyuban diantaranya Gugus, dabin, GOP, dan IGTKI. Hambatan dalam pelaksanaan program PAUD tidak adanya penilik yang bertugas untuk mengawasi serta melakukan evaluasi atas program PAUD.

Masih ada yang perlu diperbaiki yakni tingkat pendidikan guru PAUD yang sesuai dengan standart kualifikasi yakni berpendidikan minimal D-IV atau S-1 jurusan Pendidikan Anak Usia Dini atau Psikologi, keberadaan penilik yang perlu di tindaklanjuti serta pembagian bantuan biaya operasioal PAUD yang merata.

2. Guru Pendidikan Anak Usia Dini membutuhkan kompetensi khusus yang mumpuni untuk memaksimalkan proses pembelajaran. Komptensi yang harus dimiliki guru adalah
  - a. Kompetensi Pedagogik yaitu kemamuan dari guru untuk mengelola pembelajaran peserta didik, memanfaatkan prinsip-prinsip perkembangan kognitif, kepribadian. Guru juga melakukan perencanaan dan evaluasi hasil belajar.
  - b. Kompetensi Kepribadian yaitu kemampuan guru yang mencerminkan sifat personal yang mantab, stabil,

dewasa, arif, bijaksana, berwibawa berakhlak mulia sehingga guru menjadi teladan.

c. Kompetensi sosial yaitu guru sebagai bagian tak terpisahkan dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif baik dengan peserta didik, tenaga pendidik/kependidikan, dan orang tua/wali peserta didik dan masyarakat sekitar.

d. Kompetensi profesional yaitu kemampuan guru untuk menguasai materi pembelajaran secara mendalam untuk membimbing peserta didik.

3. Guru profesional harus memiliki kualifikasi akademik minimum sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV), menguasai kompetensi (pedagogik, profesional, sosial dan kepribadian), memiliki sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Faktor-faktor banyak guru tidak menekuni profesi secara utuh menjadi tanda bawasannya komitmen dan motivasi guru untuk meraih pendidikan yang lebih tinggi masih rendah. Masalah gaji yang kecil juga menjadi permasalahan, karena beberapa PAUD berazaskan dengan kesukarelaan dan sikap kepedulian dari guru yang mengajar serta jika ingin melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi sesuai standart kualifikasi

pemerintah guru tidak mempunyai keberdayaan keuangan.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh, maka diperlukan rekomendasi langkah-langkah yang mungkin bisa digunakan untuk mencapai keberhasilan Pelaksanaan Program Pendidikan Anak Usia Dini di Kecamatan Tembalang. Adapun langkah-langkah yang mungkin bisa digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Perlu adanya pelatihan pengembangan kompetensi kepada tenaga pendidik/kependidikan yang diadakan langsung oleh UPTD Pendidikan Kecamatan Tembalang selaku penanggung jawab pendidikan di Kecamatan Tembalang. Karena masih banyak nya tenaga pendidik/kependidikan yang belum sesuai dengan standart kualifikasi yang sudah ditentukan.
- b. Pemetaan lembaga PAUD secara obyektif yang diprioritaskan berdasarkan kebutuhan pemenuhan standart PAUD untuk mendapatkan anggaran perbaikan dan pengembangan lembaga PAUD.
- c. Memberikan insentif dan kemudahan kepada guru-guru yang berprestasi dan berkemauan tinggi untuk melanjutkan sekolahnya ke jenjang yang lebih tinggi sesuai standart kualifikasi yang ditetapkan.

- d. Penambahan Sumberdaya Manusia yang berada di lingkungan UPTD Pendidikan Kecamatan Tembalang, khususnya SDM untuk posisi penilik.
- e. Peningkatan pengawasan terhadap pemakaian dana operasional yang diberikan kepada lembaga PAUD agar tidak lagi terjadi penyimpangan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Basrowi & Suwandi. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka. Cipta
- Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analisis*. Yogyakarta: Cava Media.
- Moleong, Lexy.2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset
- Nusa, Putra.2012. *Penelitian Kualitatif PAUD Pendidikan anak usia dini*. Jakarta: Rajawali Pers
- Rahman, S. Hibana. 2002. *Konsep Dasar Pendidikan Anak Usia Dini*. Yogyakarta: Grafindo Litera Media
- Sarwono, Jonathan. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Siswoyo, Dwi, dkk. 2007. *Ilmu Pendidikan*. Yogyakarta: UNY Press
- Subarsono. 2012. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sudarma, Momon. 2014. *Profesi Guru : dipuji, dikritisi, dan dicaci*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada
- Sumarto, Hetifah Sj. 2009. *Inovasi, Partisipasi, dan Good Governance*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Suyadi. 2011. *Manajemen PAUD Mendirikan, mengelola, dan mengembangkan PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Tayibnapi, Farida Yusuf. 2008. *Evaluasi Program dan Instrumen Evaluasi Untuk Program Pendidikan*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Usman, Husaini & Purnomo Setiady Akbar, 2008, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik: Teori Dan Proses*. Yogyakarta: PT Buku Kita
- Wirawan.2011. *Evalusai: Teori, Model, Standar, Aplikasi, Dan Profesi*. Jakarta: Rajawali Pers

#### JURNAL :

- Junanah. 2011. *Pendidikan Anak Usia Dini Serta Implementasinya dalam Pendidikan Formal dan Informal*. *Indonesian Publication Index*, Vol 1 dan Vol IV. <http://download.portalgaruda.org/article.php>. (di akses 13 April 2016 pukul 10.38 Wib.)
- Lestari, Sri Eko. 2015. *Analisis Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Di Kota Semarang*. *Indonesian Publication Index*. <http://download.portalgaruda.org/article.php?article>. (di akses 13 April 2016 pukul 11.08 Wib.)
- Hasyim, Abd Wahid dkk. 2009. *Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)*, Vol. 1. <http://www.ejournal-unisma.net/ojs/index.php/edukasi/article>. ( di akses 15 Februari 2016 pukul 22.06 Wib.)
- Pusari, Ratna Wahyu. 2013. *Peran Pendidik PAUD Untuk Peningkatan Mutu Pendidikan*, *Indonesian Publication*

*Index.*

<http://download.portalgaruda.org/article.php?article>. (akses tanggal 9 Juli 2016)

RKPD Kota Semarang 2015

Renstra Kota Semarang 2015

Irshad, Syarif Muhammad, 2013. Pengaruh Kompetensi Profesional Guru dan Fasilitas Belajar Terhadap Hasil Belajar Siswa. [lib.unnes.ac.id/19050/1/7101408068.pdf](http://lib.unnes.ac.id/19050/1/7101408068.pdf). (akses tanggal 9 Juli 2016)

## **SUMBER LAIN**

Undang-undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional

Permendiknas No 16 tahun 2007 tentang Standart Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru

Permendiknas No. 58 Tahun 2009 tentang Standart Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Perda No 1 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kota Semarang

Artikel Pengaruh Kompetensi Profesional Guru Dan Fasilitas Belajar Terhadap Hasil Belajar Siswa oleh Muhammad irshad yg didapat dari [lib.unnes.ac.id/19050/1/7101408068.pdf](http://lib.unnes.ac.id/19050/1/7101408068.pdf) akses tanggal 9 Juli 2016

<http://www.rmol.co/read/2010/10/01/5307/Peran-Swasta-di-Dunia-Pendidikan-Sangat-Dibutuhkan->

<https://adriman1011.wordpress.com/2015/01/07/pentingnya-sarana-dan-prasarana.....> Diakses pada tanggal 17 April 2016

Laporan Pendidikan Untuk Semua Kota Semarang 2015

Laporan Tembalang Dalam Angka 2015

